

HUBUNGAN INTERNASIONAL TENTANG KERJASAMA
KEMANUSIAAN NEGARA UTARA DAN NEGARA SELATAN
(AUSTRALIA DAN INDONESIA)

Yeyen Subandi

Abstract

The southern states can be regarded as a developing country views of the average income is low, infrastructure that can be said is still relatively underdeveloped, and also the human development index which is less than the northern countries as the developed countries. Here the exception of Australia and New Zealand, despite being located in the southern part, but both countries have been classified into developed countries. Relation to humanitarian cooperation between Australia and Indonesia has been going on for a long time, and this partnership is experiencing bright and dim influenced by the political situation and international relations between the two countries. Leadership change affect the existing cooperation, because both countries still need each other in bilateral relations, although sometimes intervention. The purpose of this study was to see whether the assistance provided by Australia solely for humanitarian or any other purpose. In this article will use qualitative methods and results can be informed or to sharing for students, non-governmental organizations (NGO) and government who have been getting foreign aid from Australia in humanitarian issues, until now the Indonesian government still expect and rely on the Australian government about assistance or cooperation in humanitarian issues.

Key Words: Developed Countries, Developing Countries, Cooperation, Humanitarian, Foreign Assistance.

Latar Belakang

Hubungan Internasional (HI) dan kemanusiaan dewasa ini, mengapa muncul banyak persoalan baru secara bersamaan karena kepentingan demi kemanusiaan, apakah hanya pergeseran mengenai isu kemanusiaan saja? Mampukah teori-teori yang telah ada saat ini menjelaskan perubahan-perubahan yang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul. Pola hubungan baru tersebut mengharuskan peninjauan kembali atas berbagai teori dalam disiplin ilmu ini.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan jaman sebagai suatu disiplin, Ilmu HI dapat dikatakan sebagai “pendatang baru” setelah ilmu-ilmu humaniora yang lain (politik, hukum, ekonomi, sosiologi) berkembang dengan paradigmanya masing-masing. Keterlambatan perkembangan HI sebagai suatu ilmu tidak lepas dari asal-usul kelahiran ilmu ini, yang baru muncul pada pasca Perang Dunia ke II. Selama beberapa saat, setelah itu HI masih didominasi oleh ilmu politik, yang kemudian dapat dianggap sebagai “induk” Ilmu HI. Dominasi ini membawa konsekuensi epistemologis bagi HI, seperti masih dipertanyakannya apakah HI itu dapat dianggap ilmu.

HI pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antara bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim (*high politics*). HI kontemporer selain mengkaji hubungan politik juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, hak-hak asasi manusia, kemanusiaan, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) internasional dan lain sebagainya. Pola interaksi HI tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional baik oleh pelaku negara-negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).

Sejak akhir Perang Dingin, disiplin keilmuan HI banyak tantangan untuk menelusuri ribuan cabang dari proses yang jika sebelumnya disamarkan dalam bentuk-bentuk kekhawatiran yang berlebihan terhadap konflik negara adikuasa dan perang nuklir yang sebenarnya berakibat/dampaknya kepada manusia dan kemanusiaan. Pada era sekarang ini sudah membuka diri dengan meruntuhkan batas-batas nasional dalam ruang politik, ekonomi dan sosial. Dan sudah banyak tulisan-tulisan tentang fenomena globalisasi kemanusiaan baik di negara Selatan, Utara maupun di belahan dunia lain.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai HI dalam isu kemanusiaan di negara Selatan yaitu Australia dan Indonesia. Negara bagian Selatan bisa dikatakan sebagai negara berkembang dilihat dari rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang masih dikatakan relatif terbelakang dan juga indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan negara Utara sebagai negara maju. Di sini adanya pengecualian untuk Australia dan Selandia Baru, meskipun berada di bagian Selatan letaknya, tapi kedua negara tersebut sudah tergolong ke dalam negara maju.

Pembahasan

Hubungan Internasional dan Kemanusiaan

Hubungan antara negara maju yang dikategorikan sebagai negara Utara, dan negara berkembang yang dikategorikan sebagai negara Selatan, bila dilihat dari hubungan di bidang ekonomi ke dua negara tersebut melakukan hubungan kerjasama yang biasanya negara Utara akan menanamkan modalnya ke negara Selatan dan untungnya dibagi ke dua belah pihak. Begitupula kerjasama dilakukan untuk bidang teknologi, sosial, politik dan kemanusiaan.

Australia berada di bagian Selatan tetapi tergolong negara maju, dan ini merupakan sebuah pengecualian, kerjasama dengan Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Kerjasama antara Australia dan Indonesia sudah terjadi dan bisa dilihat dari jaman pra sejarah, di mana Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang dengan contoh persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang merupakan bukti adanya hubungan tersebut dan juga terdapat hubungan sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini sudah lama dimulai dalam sejarah manusia, tetapi sulit untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan/kerjasama antara Australia dan Indonesia itu dimulai.

Sepertinya di dalam studi HI yang mendekati ke arah isu tersebut adalah menyangkut kemanusiaan, yaitu teori kosmopolitanisme, di mana teori ini merupakan sebuah proyek perealisasiian suatu dunia yang kosmopolitan dengan basis

kesetaraan dan menyarankan bagaimana tatanan sosial dan internasional dirancang sesuai prinsip tidak melakukan, atau meminimalkan hal-hal yang membahayakan baik itu secara sengaja atau tidak sengaja pihak lain, yaitu manusia dan juga kemanusiaan termasuk juga didalamnya orang-orang asing. Dengan teori kosmopolitan ini kerjasama untuk kemanusiaan bisa dirancang lebih luas lagi dan menjadi acuan bagi penggiat-penggiat isu kemanusiaan baik itu aktor negara maupun non-negara.

Pemikiran-pemikiran HI dan kemanusiaan bukan hanya tumbuh dalam pemikir-pemikir Barat saja, tetapi pemikir non-Barat pun tumbuh dan berkembang seperti apa yang dilontarkan oleh Sayyid Qutb tentang kedaulatan dan kemanusiaan, dimana pemikiran tentang kedaulatan itu dikonstitusikan.

Dalam hal ini mengenai kemanusiaan masih juga berkiblat kepada Barat atau pendukung historisisme eropasentris yang dihasilkan membentuk semua kasus perbedaan pembangunan sebagai keganjilan, deviasi atau anomali, yang konsekuensinya tereduksi menjadi model rasionalitas dan peradaban yang anterior diakronis dan normatif inferior.

Penulis akan mencoba mengkaitkan mengenai perdebatan tentang kemanusiaan di dalam HI dan akan mengambil dari pemikiran/pandangan, yaitu: Pertama, pandangan menurut Antonio Doni dalam perdebatan mengenai kemanusiaan. Menurut Antonio Doni, kemanusiaan tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral saja, tetapi bergeser menjadi isu dalam HI. Kemanusiaan kemudian berkonotasi menjadi tiga bagian terpisah, tetapi tumpang tindih realitas: sebuah ideologi, gerakan dan profesi

(Finkelstein, 1995: 369). Mencoba menanggapi dari apa yang sudah dituliskan oleh Antonio Doni, memang semuanya berawal dari manusia dan kemanusiaan dan juga dari manusia itu sendiri, dengan adanya keinginan atau kepentingan yang ingin dicapai entah itu impian maupun cita-cita dari seorang manusia itu sendiri.

Yang kedua, Menurut Michael N. Barnett, "*Empire of Humanity*" mengeksplorasi kemanusiaan itu pertumbuhan yang luar biasa dari asal mulanya pada awal abad kesembilan belas menjadi terkenal saat dalam kehidupan global (Barnett, 2011). Berdasarkan pekerjaan yang luas, pertemuan dekat dengan banyak pihak terkemuka seperti lembaga internasional dan wawancara dengan puluhan pekerja bantuan di lapangan dan di kantor pusat, *Empire of Humanity* memberikan sejarah yang bersifat global dan intim. Menghindari baik romantisme dan sinisme, *Empire of Humanity* mengeksplorasi humanitarianisme bertahan baik itu tema, tren, dan yang paling mencolok, ambiguitas etis. Kemanusiaan berharap untuk mengubah dunia, tapi dunia telah meninggalkan jejak pada kemanusiaan.

Kemanusiaan telah mengalami tiga zaman yang berbeda, duni kekaisaran, post-kolonial, dan liberal yang masing-masing telah membentuk apa yang kemanusiaan dapat lakukan dan apa itu. Dunia telah menghasilkan bukan hanya satu kemanusiaan, melainkan varietas kemanusiaan. Selanjutnya, Barnett mengamati bahwa dunia kemanusiaan terbagi antara sebuah kamp darurat yang ingin menyelamatkan nyawa dan tidak ada lagi dan sebuah kamp alkemis yang ingin menghilangkan penyebab penderitaan.

Kamp ini menawarkan visi yang berbeda tentang apa tujuan dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan sesuai merespon secara berbeda terhadap tantangan global yang sama dan keadaan darurat kemanusiaan. Kemanusiaan telah mengembangkan metropolis lembaga-lembaga global perawatan, sebesar pemerintahan global kemanusiaan. Pemerintahan itu sendiri adalah kemanusiaan, Barnett mengamati, adalah sebuah kerajaan kemanusiaan: ia melatih kekuasaan atas individu sangat berharap untuk membebaskan, *“enhanced opportunity, increase equity, peace and security and a sustainable future”*.

Kerjasama Dalam Isu Kemanusiaan Antara Australia dan Indonesia

Setelah melihat apa yang dikatakan oleh Antonio Doni dan Michael N Barnett pada bagian sebelumnya, penulis akan mengkaitkan dari dua pemikiran tersebut dengan kasus hubungan/kemitraan/kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di dalam studi Hubungan Internasional untuk kemanusiaan secara luas. Muncul juga dalam pikiran-pikiran awam apakah Australia memberikan bantuan semata-mata untuk kemanusiaan? Atau ada intervensi di antara dua negara yang saling bekerjasama tersebut?

Pada dasarnya penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Antonio Doni dan Michael N Barnett, yang mana pada dasarnya semua di balik itu, kalau kita lihat kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah bukan hanya kepentingan kemanusiaan semata, tetapi adanya kepentingan dari

dua negara tersebut di dalam melakukan hubungan internasional baik kepentingan politik ataupun kepentingan mencari suaka (Barnett, 2011). Dengan hal seperti itu, penulis memberikan asumsi dengan menggunakan asumsi mangkok di banding asumsi pagar tinggi, dengan kata lain pemerintah Australia sebanyak-banyaknya memberikan bantuan/anggaran untuk isu kemanusiaan yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan suaka. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia dengan menggunakan asumsi mangkok tersebut dibandingkan dengan menggunakan asumsi pagar tinggi, lebih ke arah menerima atau mendapatkan bantuan dari Australia dan tidak membuat batas atau pagar tinggi tetentu untuk hubungan bilateral dari ke dua negara.

Bantuan luar negeri ataupun kerjasama Australia yang sudah diberikan ke Indonesia memiliki motif-motif yang berbeda. Pemerintah Indonesia sendiri menanggapi perihal kerjasama baik itu isu kemanusiaan atau isu lainnya, dengan kata lain apakah selama ini kerjasama dibuat untuk dilakukan, atau kerjasama dibuat untuk tidak dilakukan, dan atau kerjasama dibuat untuk melanggengkan *status quo*, semua tergantung kepada pemikiran pemerintah Indonesia mengenai kerjasama ini.

Menanggapi adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, penulis coba mengkaitkan dengan prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan di dalam Hubungan Internasional ke dua negara tersebut, baik yang dilakukan oleh Australia maupun melalui *International Non Governmental Organization* (INGO) pemerintah Australia di dalam menyalurkan bantuan atau kerjasamanya,

selama ini apakah bantuan yang telah diberikan sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam diplomasi kemanusiaan, seperti *humanity*, *netrality* maupun *imparsiality*. Begitu pula sebaliknya apakah pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang terjadi, terkadang pemerintah Australia sedikit melenceng dari prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuannya, seperti contoh: apa yang sudah diberikan (bantuan) melalui INGO Australia di dalam penyalurannya ataupun secara langsung dari pemerintah Australia, dalam implementasinya tidak melihat kebutuhan atau apa yang diperlukan oleh suara akar rumput, karena sudah ada aturan (petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)) dari pemerintah Australia, dan sebagai warga Negara Indonesia (WNI) harus pandai-pandai melihat dan mengamati kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang di dalam kerjasama yang terjadi adalah *Memorandum of Agreement* (MoA). Kekurangan yang ada untuk pemerintah Indonesia sendiri ataupun LSM lokal belum terlalu transparansi dalam melakukan prinsip akuntabilitas.

Pertentangan/pro dan kontra pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai hukuman mati bagi warga negara Australia dalam kasus narkoba berdampak besar pada bantuan yang selama ini dikerjasamakan dan juga menyebabkan hubungan yang memanas. Australia yang berharap tidak adanya hukuman mati bagi warga negaranya dengan alasan selama ini pemerintah Australia sudah banyak membantu pemerintah Indonesia. Namun, pada kenyataannya tetap adanya

atau dilakukannya eksekusi mati bagi warga negara Australia. Kebijakan dari pemerintah Indonesia inilah yang menimbulkan perdebatan baik di negara Selatan maupun di negara Utara bahkan di dunia. Menurut *The Independent Commission on International Humanitarian Issues; Humanitarian is a basic orientation towards the interest and welfare of people* (The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).

. Ini menegaskan bahwa humanitarianisme memang berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan manusia, tetapi semua kepentingan atau kesejahteraan tersebut tergantung juga kepada pimpinan/kepala dari pemerintahan yang berkuasa. Menurut komisi ini, humanitarianisme itu merupakan sebuah kerangka untuk mengenali dilema yang ada dalam pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan manusia dan juga menjadi formula untuk menyelesaikan dilema tersebut. Humanitarianisme juga dilihat sebagai perilaku individual dan sebuah kerangka untuk para *policy makers* (The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).

Mengacu pada pemikiran Grotius berpendapat bahwa kekerabatan antara manusia dibentuk oleh alam, yang mengarah ke komunitas hak. Ini memperpanjang ikatan antar bangsa serta antara masyarakat lokal. Sebuah ikatan seperti ini antara berbagai jenis masyarakat manusia membentuk hukum alam, berasal dari kaidah-kaidah penalaran yang benar. Jadi untuk Grotius, hukum universal dapat didasarkan pada sifat manusia sebagai makhluk rasional. Sama halnya pemikiran Vattel mengenai kekuasaan partai

yang ada dan menang dalam pemilihan umum (pemilu), untuk Grotius mengarah ke komunitas hak yang alih-alih kalau dilogikakan partai adalah komunitas dan menentukan kepentingan dan haknya masing-masing. Begitupula di Australia partai mana yang memenangkan pemilu maka partai tersebut juga sebagai pemegang kekuasaan anggaran untuk diberikan/didistribusikan berapa banyak ke negara yang akan ditunjuk mendapatkan bantuan tersebut dengan kata lain negara yang bekerjasama.

Kalau mengacu pada kosmopolitan dengan tujuan nilai *global governance* untuk studi kasus kerjasama antara Australia dan Indonesia, mencoba mengacu pada pemikiran Finkelstein dimana dengan menggunakan teori kosmopolitan dengan tujuan *global governance* adalah memerintah (*governing*), tanpa otoritas kedaulatan, hubungan yang melampaui batas-batas nasional (Finkelstein, 1995: 369).

Dapat dikatakan bahwa *global governance* merupakan bentuk pemerintahan internasional yang tidak otoriter. Dalam memandang hal tersebut Finkelstein mengkaitkannya dengan rezim-rezim internasional. Dalam konteks ini, rezim internasional sekaligus mengadopsi nilai-nilai kosmopolitan yang cenderung mengedepankan nilai dan kepentingan kemanusiaan. Isu-isu spesifik yang diangkat atas dasar kepentingan keberlangsungan hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Mengacu kepada pemikiran Finkelstein di dalam kosmopolitan dengan tujuan dan nilai *global governance* yang dilakukan oleh Australia, ini menandakan hubungan antara Australia dan Indonesia tanpa otoritas kedaulatan melalui

penunjukan semata-mata adanya peran Australia, tetapi secara tidak langsung mengenai bantuan/anggaran tetap dari pemerintah Australia dengan mengedepankan isu kemanusiaan melalui *Non Governmental Organization* (NGO) yang ditunjuk.

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Australia di dalam kerjasama dengan Indonesia pada awalnya atas nama kemanusiaan, tetapi kalau melihat dari perdebatan kemanusiaan dalam Hubungan Internasional, perdebatan kemanusiaan serta kerjasama yang sudah dijalin atau dilakukan, dengan mengambil contoh kasus dan pergeseran isu kemanusiaan tetap adanya intervensi yang dilakukan di antara ke dua negara tersebut, terutama intervensi dari negara yang memberikan bantuan/memberikan donor keuangan, intervensi yang dilakukan bisa terlihat atau tidak terlihat dan juga intervensi sering atau banyak ataupun tidak sering dan tidak banyak dilakukan.

Dalam perdebatan kemanusiaan untuk kasus kemitraan/kerja sama antara Australia dan Indonesia dengan mengacu kepada pemikiran Antonio Doni dan Michael N Barnett, tetapi untuk isu pergeseran kemanusiaan itu sendiri akan lebih mengacu kepada pemikiran-pemikiran dari *natural law*, *modern state* dan kosmopolitan, dan pemikiran-pemikiran yang dituliskan di atas masih mengacu pada hubungan internasional dan pemikiran Barat.

Kedua negara tersebut saling membutuhkan, walaupun sudah seringnya pergantian kepemimpinan dari kedua negara tersebut dan juga terkadang memanas di dalam hubungannya.

Mengutip dari pemikiran Michael N. Barnett bahwa “dunia kemanusiaan terbagi antara sebuah kamp darurat yang ingin menyelamatkan nyawa dan tidak ada lagi dan sebuah kamp alkemis yang ingin menghilangkan penyebab penderitaan” dari pernyataan di atas apakah Australia berkomitmen untuk menyelamatkan manusia bekerjasama dengan Indonesia hanya semata-mata karena kemanusiaan, atau demi kepentingan negaranya (Barnett, 2011).

Bantuan luar negeri sebenarnya memiliki syarat-syarat bilamana aliran modal dari luar negeri itu dikatakan sebagai bantuan, antara lain; yaitu aliran dananya tidak memiliki inisiatif keuntungan atau unsur komersial dan juga dana yang diberikan memiliki syarat dan ketentuan yang lebih ringan dan mudah daripada yang berlaku pada umumnya. Bantuan luar negeri sendiri bisa berbentuk pemberian modal. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia sebenarnya ada syarat-syarat, tetapi terkadang kurang dipublikasikan ke masyarakat luas dan juga LSM yang mendapatkan bantuan atau pemerintah pusat dan daerah kurang memahami hal tersebut.

Penulis coba membandingkan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Australia dengan Indonesia dengan tulisan dari Alan Rix yang menjelaskan tentang bantuan luar negeri atau kerjasama suatu negara, dimana suatu negara memberikan bantuan ke negara lain dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan ataupun masalah lainnya, disebabkan suatu negara yang menerima bantuan tersebut mengalami bencana dan sebagainya ini yang disebut dengan motif kemanusiaan atau

semata-mata karena atau untuk kemanusiaan, tetapi ada juga motif politik, dimana suatu negara memberikan bantuan ke negara lain karena adanya alasan politis tertentu, dengan kata lain adanya maksud lain dari pemberian bantuan tersebut yang menimbulkan keterikatan atau menciptakan suatu kondisi negara penerima donor/bantuan pada masa mendatang harus melakukan sesuatu dengan kata lain sebagai balas budi kepada negara pemberi/pendonor. Selain kedua motif yang dijelaskan sebelumnya, ada juga motif keamanan nasional, dimana suatu negara memberikan bantuan luar negeri memiliki asumsi bahwa dengan memberikan bantuan luar negeri akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong stabilitas politik yang ada. Tulisan dari Alan Rix sudah menggambarkan bahwa Australia sebagai negara pendonor mempunyai kekuasaan dan juga menanamkan intervensi kepada negara penerima donor yaitu Indonesia, motif-motif yang sudah dijelaskan oleh Alan Rix benar apa adanya dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada bahwa Australia memberikan bantuan kepada Indonesia bukan hanya motif kemanusiaan, tetapi ada motif lain.

Selain penjelasan-penjelasan dan analisa di atas, penulis mencoba mengkaitkan mengenai perdebatan kemanusiaan untuk isu kemanusiaan yang dikerjasamakan antara Australia dan Indonesia, dengan mengutip dari pemikiran humanisme dalam pengertian *Ethical Humanism* yang mengacu kepada sebuah gerakan kemanusiaan yang secara luas memiliki perhatian khusus kepada perikemanusiaan, yang memperjuangkan kaum minoritas, sebagaimana uraian berikut: humanisme tersebut menempatkan

diri sebagai satu pemikiran etis yang mempromosikan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam perkembangannya telah menjadikan manusia sadar akan eksistensinya sebagai makhluk rohani, yang sekaligus juga menandakan kembali tanggung jawabnya dalam kehidupan di dunia. Akibat pandangannya tentang manusia yang cukup optimis, humanisme telah berjasa mengembalikan harkat dan martabat manusia, menyadarkan potensinya dan menegaskan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Manusia dalam pandangan humanistik adalah ukuran segala sesuatu.

Dengan pemikiran yang diutarakan dari *Ethical Humanism* dapat digarisbawahi bahwa “manusia sadar akan eksistensinya sebagai makhluk rohani” ini menunjukkan adanya pemikiran hukum alam (*natural law*), tidak ada teori moral yang tidak didasarkan pada bentuk yang sangat spesifik teologi Aristoteles bisa dianggap sebagai pandangan hukum alam. Mungkin berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memulai pembahasan teori hukum kodrat dalam etika selain menetapkan makna untuk “teori hukum alam” dan melanjutkan dari sana. Tapi ada cara yang lebih baik melanjutkan, salah satu yang mengambil sebagai titik awal peran sentral bahwa teori moral Thomas Aquinas bermain dalam tradisi hukum alam. Jika ada teori moral adalah teori hukum alam, itu adalah Aquinas (setiap etika antologi pengantar yang mencakup materi teori hukum alam). Untuk Aquinas, ada dua fitur kunci dari hukum alam, memiliki pengakuan yang struktur pembahasannya tentang hukum alam.

Yang pertama adalah bahwa, ketika kita fokus pada peran Allah sebagai pemberi hukum alam, hukum alam hanyalah salah satu aspek ilahi, dan sebagainya teori hukum alam dari perspektif bahwa hanya satu bagian antara lain dari teori ilahi.

Yang kedua adalah bahwa, ketika kita fokus pada peran manusia sebagai penerima hukum alam, hukum alam merupakan prinsip-prinsip rasionalitas praktis, prinsip-prinsip dimana tindakan manusia yang akan dinilai sebagai masuk akal atau tidak masuk akal, dan sebagainya teori alam hukum dari perspektif bahwa bagian unggul dari teori rasionalitas praktis.

Dengan itu mengenai perdebatan kemanusiaan, pada dasarnya untuk kemanusiaan/perikemanusiaan tetapi untuk perdebatan ini dalam kasus kemitraan kerja sama antara Australia dan Indonesia bisa dilihat dari pemikiran *modern-state* apakah ada intervensi dari Australia terhadap Indonesia, atau tidak ada. Dilihat dari pemikiran *modern state* sudah jelas juga adanya intervensi yang terjadi dari negara pendonor kepada negara penerima donor dengan merujuk pada pemikiran *modern-state*.

Perdebatan kemanusiaan dan Hubungan Internasional terlihat dalam salah satu teorinya, yaitu teori Kritis (*critical theory*). Hubungan Internasional berkembang juga merupakan proyek kosmopolitan. Proyek ini berusaha meneorisasikan dan mengidentifikasi kemungkinan perealisasi suatu tuntutan dunia yang kosmopolitan termasuk didalamnya tentang kerjasama kemanusiaan. Dan masyarakat dunia menganggap semua orang (sebagai individu) diperlakukan setara dan memiliki hak dan status moral yang sama juga, sehingga semua hal dapat diakui dan

direalisasikan. Kosmopolitan mempromosikan nilai kesetaraan moral secara universal, dialog universal, serta demokrasi dan keadilan.

Selain perdebatan-perdebatan tentang kemanusiaan, penulis mengangkat juga mengenai perdebatan teori tentang bantuan luar negeri. Di dalam pemberian bantuan luar negeri dari Australia dan Indonesia atau kerjasama yang dilakukan tersebut, ada beberapa teori mengenai bantuan luar negeri, antara lain:

Pertama, aliran realis mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional. Suatu negara memberikan bantuan luar negeri bukan bertujuan untuk kemanusiaan, melainkan untuk proyeksi *power* negara si pendonor.

Kedua, teori ketergantungan mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan alat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara miskin untuk mengeksploitasi sumber daya, bantuan luar negeri dianggap sebagai sistim yang mengekalkan ketergantungan.

Ketiga, aliran moralis/idealis mengatakan bahwa bantuan luar negeri suatu negara secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu dibelakangnya. Menurut aliran ini negara kaya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin sekaligus mendorong dukungan yang saling menguntungkan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial dan hak asasi manusia (HAM).

Terakhir, teori *bureaucratic incrementalist* mengatakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara memiliki

kombinasi/bermacam-macam maksud dan tujuan, selain tujuan isu kemanusiaan ada juga tujuan geopolitik, ideologi, kepentingan komersial dan berbagai faktor dalam politik domestik negara pendonor.

Dari teori yang sudah dijelaskan di atas, bantuan luar negeri dari Australia ke Indonesia ataupun kerjasama yang sudah dilakukan bukan hanya motif kemanusiaan saja, tetapi ada maksud lain di antara negara pemberi donor dan penerima donor, dan kedua negara tersebut saling ketergantungan dan menguntungkan walaupun yang terkadang situasi politik memanas.

Dari perdebatan-perdebatan teori di atas, penulis mengacu pada hubungan antara Australia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan yang masuk ke dalam kategori teori pertama, yaitu teori realis, teori kedua yaitu teori ketergantungan dan teori keempat yaitu teori *bureaucratic incrementalis* dengan tujuan-tujuan tertentu dari Australia, selain teori-teori tentang bantuan luar negeri yang sudah disebutkan, jelaskan dan analisa, ada juga dasar/motif kemanusiaan di dalam menyalurkan bantuan dan juga ada motif politis dan *power* dari negara pendonor, yaitu Australia, karena selain memberikan/mendonorkan bantuannya kepada Indonesia, Australia juga memberikan bantuan melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam isu kemanusiaan untuk negara-negara yang membutuhkan.

Pada tahun 2016 apakah Australia masih menyalurkan bantuan luar negeri ataupun bekerjasama untuk isu kemanusiaan ataupun isu lainnya kepada Indonesia, karena pada 1 Januari

2016 juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) termasuk Indonesia yang berada di negara bagian selatan. Karena kalau mengacu pada pemikiran pandangan Asia dan Australia (ASLIA) dari Tan Malaka dimana menurutnya ASLIA adalah sebuah gagasan atau visi tentang federasi atau perserikatan sosialis dari semua negara yang terletak di antara Asia dan Australia, di mana didalamnya ada pembagian Australia Utara dan Asia. Tan Malaka di dalam pemikirannya, Indonesia dan Australia itu bersatu.

Kesimpulan

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Australia dan Indonesia di dalam kerjasama kemanusiaan yang pada awalnya mengatasnamakan kepentingan kemanusiaan, tetapi berkelanjutannya dengan isu pergeseran kemanusiaan dengan adanya intervensi. Dengan itu kita bisa melihat dari teori-teori perdebatan kemanusiaan di dalam Hubungan Internasional dan pergeseran kemanusiaan dari *natural law*, *modern-state* dan kosmopolitan dengan tujuan dan nilai *global governance*.

Untuk perihal kerjasama yang dilakukan dalam program/isu untuk kemanusiaan, Australia tergantung juga kepada partai yang mendominasi dan memenangi pemilu seberapa besar bantuan yang akan diberikan dan kepada negara mana saja akan dikerjasamakan. Kalau melihat sejarah kerjasama yang sudah dilakukan antara Australia dan Indonesia dari jaman pra-sejarah, Orde Lama, Orde Baru dan jaman Reformasi sudah terlihat adanya intervensi yang dilakukan dari kerjasama di antara ke dua negara tersebut.

Di dalam kerjasama ini (kerjasama untuk kemanusiaan) juga masih adanya kontroversi dan perdebatan serta perbedaan visi dan misi, apakah untuk kemanusiaan yang tanpa dibumbui oleh segi politis dengan kata lain hanya dan untuk kemanusiaan. Kemanusiaan tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral saja tetapi bergeser menjadi isu dalam Hubungan Internasional. Kemanusiaan kemudian berkonotasi menjadi tiga bagian terpisah, tetapi tumpang tindih realitas: sebuah ideologi, gerakan dan profesi. Tetapi kita harus tetap optimistis bahwa kemanusiaan sangat berperan di dalam Hubungan Internasional, walaupun isu kemanusiaan sampai saat ini masih menjadi tujuan utama politik suatu manusia dan negara.

Sudah jelas apa yang dilakukan oleh Australia yang masuk ke dalam kategori negara maju walaupun berada di negara bagian Selatan mempunyai kepentingan-kepentingan untuk dilakukan bersama “kerjasama” dengan negara selatan lainnya salah satunya Indonesia.

Ada beberapa motif negara dalam memberikan bantuan, termasuk didalamnya Australia dalam memberikan bantuannya kepada Indonesia, yaitu: motif kemanusiaan, motif politik dan motif keamanan nasional. Begitupula apa yang sudah dilakukan oleh Australia dalam memberikan bantuannya dengan adanya motif-motif yang sudah disebutkan. Walaupun pergantian pimpinan kedua negara dari masa ke masa kedua negara tersebut masih saling membutuhkan meskipun terkadang adanya situasi panas di dalam politik ataupun di dalam hubungan internasional dari kedua negara tersebut.

Melihat kerjasama antara Indonesia dengan Australia, dilihat dari sudut pandang asumsi mangkok dibandingkan asumsi pagar tinggi, dengan kata lain Indonesia masih membutuhkan bantuan/dana dari Australia dibandingkan harus membatasi hubungan yang ada, dan sebaliknya Australia membutuhkan Indonesia dalam kerjasama dalam isu kemanusiaan.

Selain bantuan dengan isu kemanusiaan yang diberikan kepada Indonesia, Australia juga memberikan bantuan melalui PBB atas dasar isu-isu kemanusiaan untuk negara-negara miskin ataupun negara berkembang lainnya. Selain itu, kerjasama antara Australia dan Indonesia perihal bantuan luar negeri untuk isu kemanusiaan dipenuhi adanya perdebatan-perdebatan mengenai teori-teori yang muncul yang ada di Hubungan Internasional. Perdebatan dan penjelasan dalam teori penulis juga menganalisis mengenai teori tersebut dalam kasus kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan.

Untuk kedepannya kerjasama antara Australia dan Indonesia khususnya dalam isu kemanusiaan ataupun isu-isu lainnya, bagi pemerintah, Kementerian, instansi, LSM, ataupun masyarakat luas untuk lebih memperhatikan MoU yang ada antara pihak yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah Australia ataupun pihak pemerintah yang menandatangani nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan tujuan bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan untuk kemanusiaan. Begitu juga untuk pemerintah Indonesia ataupun LSM untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dan transparansi, kalau perlu dipublikasikan hal seperti ini, dimana publikasi masih belum optimal. Hal tersebut dilakukan

dengan maksud dan tujuan agar kepercayaan dari negara pendonor ataupun lembaga yang ditunjuk oleh pendonor dapat dipelihara dan kerjasama yang selama ini dibuat dan dikerjasamakan dapat terus berjalan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Barnett. N, Michael. 2011. Hubungan Internasional dan Ilmu Politik *Empire of Humanity: Sebuah Sejarah Kemanusiaan*. Ithaca. Cornell UP.

The Independent Commission on International Humanitarian Issues, Humanitarian is a basic orientation towards the interest and welfare of people (Dalam buku *The Winning Human Race. The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues*).

Robbie Shiliam, (2011) *Hubungan Internasional dan Pemikiran Non-Barat*. Pustaka Pelajar.